

**PRESKRIPSI PENGELOLAAN HUTAN JATI RAKYAT
DI KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI



JAMIL

105951102916

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**PRESKRIPSI PENGELOLAAN HUTAN JATI RAKYAT
DI KECAMATAN PARANGLOE KABUPATEN GOWA**



Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan Strata Satu
(S-1)

**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2021**

17/04/2021

1 cap
Smb. Alumni

R/0020/HUT/21 cs
JAM
p¹

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Preskripsi Pengelolaan Hutan Jati Rakyat di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa
Nama : Jamil
Stambuk : 105951102916
Program Studi : Kehutanan
Fakultas : Pertanian

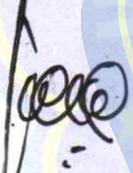
Makassar, Februari 2021

Telah diperiksa dan disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Hikmah. S.Hut.,M.Si.,IPM
NIDN: 0011077101


Dr. Ir. Hasanuddin Molo.S.Hut.,M.P.,IP
NIDN: 0907028202

Diketahui,

Dekan Fakultas Pertanian

Ketua Prodi Kehutanan


Dr.H. Burhanuddin, S.Pi., M.P
NIDN : 0912066901


Dr.Hikmah.S.Hut.,M.Si.,IPM
NIDN : 0011077101

HALAMAN KOMISI PENGUJI

Judul : Preskripsi Pengelolaan Hutan Jati Rakyat di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

Nama : Jamil

Stambuk : 105951102916

Program Studi : Kehutanan

Fakultas : Pertanian

SUSUNAN KOMISI PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Dr. Hikmah.S.Hut.,M.Si.,IPM

Pembimbing I

(.....)

Dr.Ir.Hasanuddin Molo,S.Hut.,M.P,IPM

Pembimbing II

(.....)

Dr.Irma Sribianti,S.Hut.,M.P

Penguji I

(.....)

Andi Azis Abdullah,S.Hut.,M.P

Penguji II

(.....)

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul.

Preskripsi Pengelolaan Hutan Hati Rakyat di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa adalah benar-benar merupakan hasil karya yang belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Makassar, Februari 2021

Penulis

@Hak Cipta Milik Unismuh, tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. *Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.*
 - a. *Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,*
 - b. *Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unismuh Makassar.*
2. *Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk laporan apapun tanpa izin Unismuh Makassar*

ABSTRAK

Jamil 105951102916. Preskripsi Pengelolaan Hutan jati Rakyat di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa dibimbing oleh **Hikmah dan Hasanuddin Molo.**

Pengelola hutan jati rakyat yang oleh masyarakat di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa terdiri atas dua jenis kayu yaitu kayu jati (*Tectona grandis*) dan Jati putih (*Gmelina arborea*) dan memiliki manfaat bagi masyarakat yang cukup besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan manfaat tersebut, maka penelitian tentang Preskripsi pengelolaan hutan jati rakyat di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa sangat penting untuk diteliti karena dengan mengetahui bagaimana preskripsi pengelolaan hutan jati rakyat, akan menghasilkan argumentasi baru cocok dalam penanganan hutan jati rakyat yang tepat yang dapat meningkatkan produktifitas hutan jati rakyat demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Preskripsi Pengelolaan hutan jati rakyat di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Teknik pengambilan data dengan metode sensus. Hasil penelitian memiliki sistem budidaya yang diterapkan hanya mengandalkan bibit anakan alami sebagai sumber bibit. Pemeliharaan dilakukan berupa pembersihan gulma, pemangkasan serta pemeliharaan serta pemeliharaan trubusan yang sudah tumbuh. Pemungutan hasil dilakukan dengan cara memilih dan menebang pohon setelah adanya permintaan dari pembeli. Volume rata-rata yaitu 16,12 m³/ha, kerapatan 435 pohon/ha dan potensi 161,19 m³/ha. Artinya potensi hutan jati rakyat yang ada pada Kecamatan Parangloe cukup besar.

Kata Kunci : Hutan Jati Rakyat, Pengelolaan, Preskripsi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **"Preskripsi Pengelolaan Hutan Jati Rakyat Di Kecamatan Parangloe"**. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai akhir Zaman.

Adapun Tujuan Pembuatan Skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan Strata satu pada Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penghargaan dan banyak terimakasih yang tulus kupersembahkan kepada orang yang paling ku cintai yaitu orang tuaku Roce Dg. Naba dan Marhaeni Dg. Mara semoga Allah Melimpahkan Rahmat, Kesehatan, keberkahan dan reski karena keikhlasan dan kesabarannya menunggu penulis menjadi seorang Sarjana Kehutanan.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada ibunda Dr. Hikmah, S.Hut, M.Si selaku pembimbing I dan ayahanda Dr.Hasanuddun Molo, S.Hut., MP selaku Pembimbing II yang telah membantu dalam penulisan Skripsi ini. Ucapan terima kasih Penulis ucapkan:

1. Ayahanda Dr. H. Burhanuddin, S.Pi.MP selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Ibunda Dr. Hikmah, S. Hut, M.Si selaku Ketua Program Studi Kehutanan yang selama ini meluangkan untuk memberikan arahan dan motivasi kepada Penulis.

3. Ibunda Dr. Ir. Husnah Latifah, S.Hut.,M.Si., IPM Selaku Penasehat Akademik yang selalu memberi nasehat kepada penulis selama melaksanakan proses pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Seluruh Dosen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar atas ilmunya.
5. Terima kasih kepada instansi terkait yang telah membantu penulisan dalam kelancaran penelitian
6. Terima kasih Kepada Saharuddin, Zulkifli dan Rezki Hidayati yang telah meluangkan waktunya menemani dalam pengumpulan data.
7. Akhir penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak dan apabila ada yang tidak tersebut kan, penulis mohon maaf. Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat khusus bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Makassar, Februari 2021

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAN	ii
HALAMAN KOMISI PENGUJI	iii
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR IAMPIRAN	xiii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
II. TUJUAN PUSTAKA	
2.1 Preskripsi.....	4
2.2 Hutan Rakyat	6
2.3 Pengelolaan Hutan	9
2.4 Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat.....	10
2.5 Potensi Hutan Rakyat.....	10
2.6 Pengelolaan Hutan Rakyat.....	12
2.7 Kerangka Pikir	14
III. METODE PENELITIAN	
3.1 Waktu dan Tempat.....	16

3.2 Objek dan Alat penelitian	16
3.3 Penentuan Sampel Metode.....	16
3.4 Teknik pengumpulan Data.....	16
3.5 Jenis Data.....	17
3.6 Analisis Data.....	18
IV. KEADAAN UMUM LOKASI	
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Parangloe.....	22
4.2 Keadaan Geografis.....	22
4.3 Pola Penggunaan Lahan.....	23
4.4 Penduduk.....	24
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	
5.1 Karakteristik Sosial Ekonomi Pengelolaan Hutan Jati Rakyat.....	25
5.2 Analisis Penaksiran Potensi Tegakan dan Perhitungan Kerapatan.....	29
5.3 Preskripsi Pengelolaan Hutan Jati Rakyat.....	31
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1 Kesimpulan	36
6.2 Saran	36
DAFTAR PUSTAKA.....	37

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Pola Penggunaan Lahan di Kecamatan Parangloe.....	23
2. Jumlah Penduduk di Kecamatan Parangloe.....	24
3. Sebaran umur responden Kecamatan Parangloe per Desa/Kelurahan.....	25
4. Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan Parangloe.....	26
5. Jumlah Tanggungan Keluarga Responden.....	27
6. Jenis Pekerjaan Responden di Kecamatan Parangloe.....	28
7. Luas Lahan Responden.....	29
8. Volume Pohon Per Plot.....	30

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Kerangka Pikir Preskripsi Pengelolaan Hutan Jati Rakyat	15
2. Petak persegi yang di buat pada lahan hutan jati rakyat	17
3. Cara Pengambilan Data.....	20



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Kuesioner Penelitian	39
2. Identitas Responden	41
3. Hasil Pengukuran Dan Perhitungan Plot 1 sampai Plot 10.....	42
4. Dokumentasi Penelitian	53



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permintaan pasokan bahan kayu di Indonesia terus meningkat namun berbanding terbalik dengan kemampuan penyediaan kayu dari hutan Negara yang terus menurun (Indartik 2008). Hal ini terjadi karena kawasan hutan di Indonesia mengalami kerusakan dan degradasi dari waktu ke waktu. Sebagian besar disebabkan oleh aktifitas manusia berupa transmigrasi, kebakaran hutan, pembalakan liar, perambahan kawasan menjadi pemukiman dan perkebunan (Supriatna, 2008; Forest Watch Indonesia, 2014). Upaya pemanfaatan potensi sumber bahan baku kayu secara maksimal dilakukan melalui ekstensifikasi hutan tanaman, antara lain: Hutan Tanaman Industri, Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Rakyat (Awang *et al.*, 2014 Hendra *et al.*, 2014; Suryandari, 2008).

Hutan rakyat dapat diartikan sebagai hutan yang berisi tanaman kayu ditanam pada lahan-lahan tertentu dalam kawasan hutan milik masyarakat. Keberadaan hutan rakyat di Indonesia semakin penting karena turut menyumbang pasokan kebutuhan kayu bagi industri per kayu. Hutan rakyat merupakan salah satu sarana dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan. Hutan rakyat adalah hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat yang berada di atas tanah milik atau tanah adat.

Hutan rakyat sudah berkembang sejak lama di kalangan masyarakat Indonesia, dan dikelola secara tradisional oleh pemiliknya. Kawasan hutan rakyat di Sulawesi selatan cukup besar, yaitu 223.428 ha atau 7,40% dari kawasan hutan

(Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015). Pengembangan hutan rakyat saat ini memiliki kekuatan dan peluang yang menguntungkan, jika kebijakan pemerintah mendukung serta melindungi petani hutan rakyatnya (Widiyanto *et al.*,2012). Hutan rakyat memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat terkhusus bagi masyarakat pedesaan yang memang dikembangkan untuk pemenuhan kebutuhan kayu masyarakat tersebut seperti kayu bakar, kayu penebangan, kayu bahan industri, buah-buahan serta tanaman-tanaman lain dalam kawasan hutan rakyat.

Hutan Rakyat memiliki nilai penting bagi kehidupan masyarakat terutama di pedesaan. Nilai penting dari hutan rakyat adalah manfaat ekonomi sebagai sumber pendapatan, manfaat sosial-budaya berupa lapangan pekerjaan di bidang bercocok tanam, dan keanekaragaman hayati (Kaskoyo *et al.*,2014; Widiyanti, 2012).

pengelolaan hutan jati rakyat yang dilakukan oleh masyarakat memiliki di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan ada dua jenis jati yaitu jati lokal (*Tectona grandis*) dan Jati putih (*Gmelina arborea*). Manfaat yang diperoleh masyarakat cukup besar, baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Manfaat langsung adalah hasil kayunya yang sebagian besar dimanfaatkan masyarakat sehari-hari seperti kayu bakar rangka rumah, dan papan, sedangkan manfaat tidak langsungnya berupa perbaikan iklim mikro yang di sekitar hutan rakyat untuk menanggulangi *global warning*. Berdasarkan manfaat tersebut, maka penelitian tentang Preskripsi pengelolaan hutan jati rakyat di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa sangat penting untuk di teliti karena dengan mengetahui bagaimana preskripsi pengelolaan hutan jati rakyat, akan

menghasilkan argumentasi baru cocok dalam penanganan hutan jati rakyat yang tepat yang dapat meningkatkan produktifitas hutan jati rakyat demi kesejahteraan masyarakat Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah mengetahui bentuk Preskripsi Pengelolaan hutan jati rakyat di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui preskripsi pengelolaan hutan jati rakyat di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut :

1. Sebagai bahan pertimbangan Pengelolaan Hutan Rakyat di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa di masa yang akan datang.
2. Sebagai bahan informasi peneliti selanjutnya

II. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Preskripsi

Preskripsi adalah suatu bentuk pemberian pendapat (justifikasi), perbaikan, rekomendasi, saran atau perbaikan yang sifatnya membangun dengan argumentasi baru yang bersifat terukur agar suatu masalah/kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dari sebelumnya (Trisno S dan Hero, 2011).

Pengembangan preskripsi telah dilakukan dalam perencanaan pengelolaan hutan saat ini. Preskripsi tertentu diterapkan pada suatu tipe lahan bersama-sama dengan prediksi hasil secara kuantitatif dan perkiraan hasil yang lain apabila preskripsi tersebut diimplementasikan merupakan building block dari model perencanaan dan skedul pembangunan hutan modern yang sebenarnya (Supratman dkk, 2009).

Preskripsi pengelolaan hutan adalah seperangkat kegiatan yang diimplementasikan pada suatu tegakan untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan, membangun, menilai dan mengaplikasikan preskripsi-preskripsi pada suatu tegakan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh profesional kehutanan dimana pada aktivitas tersebut teori-teori dan prinsip-prinsip pengelolaan hutan diaplikasikan dalam dunia nyata.

Preskripsi pengelolaan hutan yang baik berpedoman pada empat hal yaitu :

1. Keutuhan dan Kelanjutan Ekologi

Preskripsi pengelolaan hutan harus mempertimbangkan berbagai fungsi lingkungan maupun jasa-jasa yang diberikan oleh hutan antara lain,

pemeliharaan, keanekaragaman hayati hutan, perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan fungsi daur ulang, zat hara yang penting, perlindungan iklim mikro dan iklim setempat dan lain-lain.

2. Pembangunan produk dan jasa hutan oleh manusia secara berkelanjutan dan adil. Preskripsi pengelolaan hutan mempertimbangkan ciri-ciri ekologi, faktor-faktor sosial dan demografi, serta potensi ekonomi pada setiap unit manajemen. Biaya-biaya dan manfaat-manfaat ekonomi baik perlindungan maupun produksi hutan dipikul masyarakat setempat, sektor swasta dan pemerintah.
3. Pengelolaan terpadu pada skala yang tepat
Hutan dikelola dalam suatu kerangka perencanaan wilayah, pengambilan keputusan dan pengelolaan yang memperhitungkan pemukiman manusia di sekitarnya, tanah-tanah pertanian, dan berbagai macam kegiatan ekonomi. Pertimbangan-pertimbangan ekologi dan sosial menentukan ukuran wilayah pengelolaan. Pemerintah, masyarakat, swasta dan kepentingan-kepentingan lain bersama-sama merumuskan pilihan-pilihan pengelolaan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan baik pada kawasan hutan maupun pada lahan-lahan masyarakat serta mengatasi masalah penggunaan lahan.
4. Keikutsertaan yang adil dan bijaksana oleh semua pihak yang berkepentingan
Memberikan kewenangan dan hal atas informasi dan partisipasi kepada semua pihak yang berkepentingan dalam proses perumusan keputusan-keputusan pengelolaan dan kebijakan kehutanan (Supratman dkk, 2009)

Preskripsi hutan rakyat merupakan informasi awal yang dapat digunakan untuk kegiatan perencanaan jangka panjang. Perencanaan hutan memerlukan data dan informasi menyeluruh tentang wilayah yang akan diterapkan suatu kebijakan. Pendekatan preskripsi diperlukan bagi pihak yang berkepentingan, yaitu pembuat kebijakan dan petani hutan rakyat. Preskripsi adalah serangkaian kegiatan yang diimplementasikan dalam suatu tegakan untuk mencapai hasil tertentu. Preskripsi pengelolaan hutan rakyat dapat dibuat, tetapi akhirnya akan tergantung pada tujuan pemilik hutan, jumlah waktu, dana, dan detail analisis yang dicurahkan untuk merencanakan dan mengelola hutan tersebut.

2.2 Hutan Rakyat

2.2.1 Pengertian Hutan Rakyat

Hutan rakyat ialah hutan yang terdapat di atas tanah yang dibebani hak atas tanah seperti hak milik, hak guna dan hak pakai. Lahan yang dibebani dengan hak-hak seperti ini adalah lahan milik masyarakat. Oleh karenanya, hutan rakyat disebut juga dengan hutan milik. Hutan rakyat dapat diartikan sebagai tanaman kayu yang ditanam pada lahan-lahan milik masyarakat. Keberadaan hutan rakyat di Indonesia semakin penting karena turut menyumbang pasokan kebutuhan kayu bagi industri perindustrian. Disamping itu hutan rakyat merupakan salah satu sarana dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan (Pramono dkk, 2010).

Komposisi seperti itu saling melengkapi baik dari segi ekologi maupun ekonomi. Karena budidaya hutan rakyat merupakan kebiasaan turun temurun

maka para petani sudah terbiasa melakukan rehabilitasi dalam arti setiap pemanenan komoditi yang ditanam di atas lahan miliknya segera disusul dengan penanaman kembali. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat karena telah merasakan hasil yang diperoleh dari budidaya hutan rakyat.

Pengelolaan hutan rakyat tersebut saat ini praktis tidak ada perubahan baik ditinjau dari segi manajemen nya, teknik budidaya sampai pemasaran nya (Trison S dan Hero, 2011).

2.2.2 Manfaat Hutan Rakyat

Manfaat hutan rakyat adalah untuk merehabilitasi dan meningkatkan produktivitas lahan serta kelestarian sumberdaya alam agar dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada pemiliknya, sehingga kesejahteraan hidup pemiliknya meningkat.

Apabila dirinci manfaat penggunaan hutan rakyat tersebut adalah :

- a. Meningkatkan pendapatan petani pedesaan terutama di daerah lahan kritis
- b. Memperbaiki tata air dan lingkungan pada lahan milik rakyat
- c. Memanfaatkan secara optimal lahan yang tidak produktif untuk usaha tani tanaman semusim maupun tahunan, serta meningkatkan produktivitas lahan kritis atau areal yang tidak produktif secara optimal dan lestari
- d. Penganekaragaman komoditas dan hasil pertanian yang diperlukan masyarakat, dan meningkatkan produksi kayu bukan dan kayu perkakas
- e. Membantu masyarakat dalam penyediaan kayu bangunan dan bahan baku industri lainnya (Pramono dkk 2010).

2.2.3 Tujuan Hutan Rakyat

Menurut soemitro (1985), tujuan adanya hutan rakyat antara lain:

1. Memanfaatkan secara maksimal dan lestari lahan yang tidak produktif atau lahan produktif karena keadaan lapangan dan tanah tidak sesuai untuk penanaman pangan.
2. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya petani akan kebutuhan kayu baik, baik kayu bakar maupun kayu perkakas serta jenis hasil hutan lainnya.
3. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat petani sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.
4. Untuk memperbaiki tata air dan lingkungan, khususnya lahan yang ada kawasan perlindungan daerah aliran air.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Hutan Rakyat

Prinsip-prinsip hutan rakyat dalam pengelolaannya terdiri atas :

1. Masyarakat atau rakyat sebagai pelaku utama dalam pengambilan manfaat
2. Masyarakat atau rakyat sebagai pengambil keputusan dan menentukan sistem pengusahaan dan pengelolaan yang tepat
3. Pemerintah sebagai fasilitator dan pemantau kegiatan
4. Kepastian dan kejelasan hak dan kewajiban semua pihak
5. Kelembagaan pengusahaan ditentukan oleh masyarakat atau rakyat

6. Pendekatan pengusahaan didasarkan pada keanekaragaman hayati dan budaya, terkhusus mengiring lahir dan berkembangnya kegiatan usaha yang produktif dan efisien

2.3 Pengelolaan Hutan

Pengelolaan adalah merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan (Moekijat, 2012).

Berdasarkan karakteristik hutan rakyat bila ditinjau dari aspek manajemen hutan, yaitu (Awang et al, 2017) :

- a. Hutan rakyat berada di tanah milik dengan alasan tertentu, seperti lahan yang kurang subur, kondisi topografi yang sulit, tenaga kerja yang terbatas, kemudahan pemeliharaan dan faktor resiko kegagalan yang kecil
- b. Hutan rakyat tidak mengelompok dan tersebar berdasarkan letak dan luas kepemilikan lahan, serta keragaman pola wana tani pada berbagai topografis lahan
- c. Pengelolaan hutan rakyat berbasis keluarga yaitu masing-masing keluarga melakukan pengembangan dan pengaturan secara terpisah
- d. Pemanenan hutan rakyat berdasarkan sistem tebang butuh, sehingga konsep kelestarian hasil belum berdasarkan kontinuitas hasil, yang dapat diperoleh dari perhitungan pemanenan yang sebanding dengan pertumbuhan (riap) tanaman
- e. Belum terbentuk organisasi yang profesional untuk melakukan pengelolaan hutan rakyat

- f. Belum ada perencanaan pengelolaan hutan rakyat, sehingga tidak ada petani hutan rakyat yang berani memberikan jaminan terhadap kontinuitas pasokan kayu bagi industri
- g. Mekanisme perdagangan kayu rakyat di luar kendali petani hutan rakyat sebagai produsen, sehingga keuntungan terbesar dari pengelolaan hutan tidak dirasakan oleh petani hutan rakyat

2.4 Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM) merupakan sebuah istilah untuk berbagai konsep pengelolaan hutan. Pengembangan PHBM didasarkan pada kondisi lokal, tradisi dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai varian skema PHBM 11 seperti Hutan Kelurahan, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat dan lain-lain. Meski demikian berbagai skema tersebut mempunyai ciri penting yang sama yakni PHBM harus didasarkan akses yang legal dan pasti bagi masyarakat terhadap sumberdaya hutan.

Hutan dikelola oleh masyarakat itu sendiri dan masyarakat mengambil keputusan bagaimana mengelola sumberdaya mereka. Selanjutnya konsep PHBM juga mendukung masyarakat untuk memperoleh hak atas sumberdaya yang merupakan bagian penting dalam hidup mereka (Suharjito dkk, 2009).

2.5 Potensi Hutan Rakyat

2.5.1 Kayu Jati (*Tectona grandis*)

Jati (*Tectona grandis*) dikenal sebagai kayu komersial bermutu tinggi, termasuk dalam suku Verbenaceae, (Situpang, 2000). Saat ini jati telah dikenal

secara luas dan dikembangkan oleh pemerintah, swasta dan petani. Tanaman ini telah banyak dikembangkan, bahkan di beberapa tempat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan tradisional masyarakat (Anggraeni dan Asmaliyah, 2008).

Tanaman jati memiliki masa tebang yang panjang sehingga memiliki fungsi lingkungan dalam pengaturan tata air (hidrologi) dan iklim lokal. Kualitas kayunya yang tinggi, memungkinkan hasil olahannya untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama (Widjayanto, 2012).

Pada daerah yang memiliki musim kemarau yang panjang, jati akan menggugurkan daunnya dan menghasilkan lingkaran tahun yang artistik. Sementara itu, di daerah yang curah hujannya tinggi, tanaman jati tidak akan menggugurkan daun dan hasil lingkaran tahunnya akan menjadi kurang menarik. Oleh sebab itu kualitas kayunya lebih rendah dibanding daerah yang memiliki kemarau panjang. Kayu jati yang berasal dari daerah dengan intensitas musim kemarau panjang memiliki struktur kayu yang lebih kuat dan dikelompokkan ke dalam jenis kayu mewah (*fancy wood*) atau kayu kelas II soal keawetan (Dadan, 2010).

Berikut ini adalah ciri-ciri dan sifat utama dari kayu jati :

1. Memiliki kekuatan dan keawetan yang sangat baik
2. Berwarna coklat muda hingga coklat tua
3. Mudah dipotong-potong dan mudah diolah menjadi banyak produk
4. Tidak mudah berubah bentuk akibat perubahan cuaca
5. Memiliki bobot yang berat dan kokoh (Soerianegara dkk, 2014)

2.5.2 Manfaat dan Kegunaan Jati

Pohon jati (*Tectona grandis*) merupakan salah satu jenis pohon yang tingkat pertumbuhannya lambat dan rendah, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu pohon jati hingga dapat dimanfaatkan kayunya. Pohon ini merupakan salah satu tanaman yang menghasilkan kayu dengan kualitas yang luas biasa dan sudah terkenal diseluruh dunia. Banyak sekali barang-barang yang terbuat dari kayu jati memiliki daya tahan yang sangat lama (Widjayanto, 2012). Pohon jati berguna untuk membuat berbagai konstruksi berat dan furniture, selain itu hasil sedahan kayu jati yang pahit dapat dijadikan sebagai penawar rasa sakit.

Jati adalah pohon yang memiliki nilai komersial yang tinggi, dibawa dari India dan dibudidayakan pada Zaman penjajahan Belanda dan ternyata juga cocok tumbuh berkembang di Indonesia. Banyak masyarakat yang memanfaatkan kayu jati untuk pengrajin benda, kursi, meja, lemari dan lain-lain. Begitu juga dengan warga jepang yang sudah terbiasa untuk mencari penghasilan sebagai pengrajin jati. Kayu jati banyak digunakan untuk bantalan rel kereta api, tiang jembatan, mebel, balok dan gelagar rumah, serta kusen, pintu, dan jendela Produk jati mempunyai nilai jual yang tinggi akibat maraknya permintaan ekspor kayu olahan yang berbahan kayu jati. Pengembangan potensi yang ada di masyarakat dalam hal teknologi manajemen dan permodalan sehingga mampu menghasilkan produk yang luar biasa hasilnya bagi peningkatan taraf hidup. Kebutuhan perbaikan

kualitas lingkungan hidup. Kebutuhan perbaikan kualitas lingkungan hidup, antara lain produksi oksigen dan konservasi hutan, tanah dan air.(Simatupang,2000)

2.5.2. Kayu Jati Putih (*Gmelina arborea*)

Nama botani *Gmelina arborea* dari famili Verbenaceae dan dikenal oleh masyarakat dengan *Gmelina* atau jati putih. Jenis ini tumbuh pada ketinggian tempat sekitar 90 – 1500 mdpl. Tanaman tumbuh baik pada daerah dengan curah 15 hujan sekitar 700 – 4500 mm/tahun dan juga dapat tumbuh pada tanah marginal. Tanaman *Gmelina* banyak ditanam sebagai tanaman pelindung, walaupun sebagian besar dimanfaatkan sebagai tanaman komersial. Semua bagian pohon dapat dimanfaatkan untuk dijual, mulai batang gelondongan, cabang, bahkan ranting. Kayu *Gmelina* digunakan sebagai konstruksi ringan, peti kemas, pulp dan vincer. Tegakan jenis ini bila terserang api maka beberapa saat setelah musim hujan dapat tumbuh kembali dengan banyak cabang.

2.6 Pengelolaan Hutan rakyat

Adapun pengelolaan hutan rakyat yaitu;

a. Persiapan lahan

Persiapan lahan diperlukan agar lahan menjadi tempat tumbuh yang baik untuk jati. Pembersihan lahan dan pengelolaan tanah antara lain berfungsi untuk mengurangi tumbuhan pengganggu (gulma), memperbaiki kualitas tanah. Pembersihan lahan juga ditujukan untuk mengurangi naungan, karena jati termaksud tumbuhan yang tidak tahan naungan.

b. Persiapan bibit

Persiapan bibit cukup penting sebelum melakukan penanaman, yaitu dari anakan alami dari stump. Ada beberapa cara lain yang membutuhkan teknologi dan biaya yang tinggi untuk membibitkan jati, antara lain dengan kultur jaringan.

c. Penanaman

Penanaman pohon adalah untuk meningkatkan kepedulian dari berbagai pihak akan pentingnya penanaman pohon berkelanjutan dalam mengurangi Dampak pemanasan global.

d. Pemeliharaan

Agar tegakan jati dapat tumbuh dengan baik, cepat, dan menghasilkan kayu berkualitas, maka dilakukan kegiatan pemeliharaan yang meliputi: pembersihan gulma, pemupukan, penyulaman, pemangkasan, dan penjarangan.

e. Pemanenan

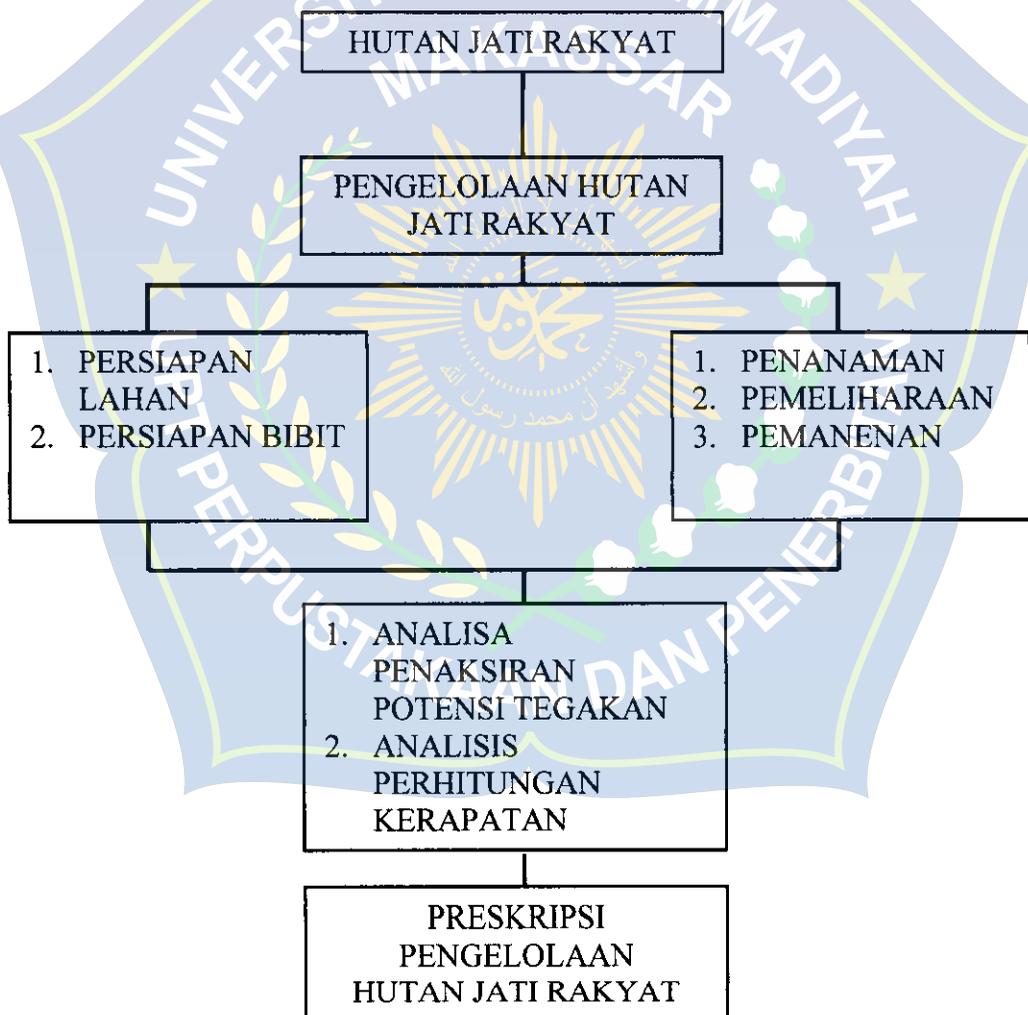
Agar dapat memberikan penghasilan yang maksimal sebaiknya pohon jati ditebang jika telah cukup dewasa untuk menghasilkan kayu berkualitas baik, minimal pohon telah berumur 15-20 tahun dan harga kayu sedang tinggi.

2.6 Kerangka Pikir

Hutan jati rakyat di kecamatan merupakan salah satu dari mata pencaharian masyarakat yang terdiri dari hasil kayu yang merupakan hasil utama dari hutan jati rakyat yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari (papan, tiang rumah, kusen), maupun untuk dijual (meja, kursi, lemari dan baham meubel lainnya). Oleh karena itu, maka kondisi pengelolaan hutan jati rakyat di Kecamatan Parangloe perlu diperhatikan karena dilihat dari manfaatnya yang sangat mendasar bagi kehidupan masyarakat sekitar. Adapun kondisi pengelolaan yang dapat

dilihat meliputi persiapan lahan, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemanenan.

Berdasarkan uraian pada kerangka pikir, melalui penelitian ini diuraikan preskripsi pengelolaan hutan jati rakyat di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Untuk lebih jelasnya, kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. .Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat

Penelitian dilakukan selama 3 bulan pada bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2021 di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2 Bahan dan Alat Penelitian

Bahan penelitian ini adalah masyarakat yang memiliki hutan jati rakyat adapun alat penelitian yang akan di gunakan dalam pengambilan data lapangan adalah Tali Rafiah untuk pembuatan plot, pita meter untuk pengukuran keliling batang, alat tulis untuk mencatat informasi dari masyarakat, kuesioner digunakan untuk mengisi daftar pertanyaan, kamera untuk dokumentasi, tally sheet, Abney level, dan rol meter.

3.3 Penentuan Sampel Metode

Pengumpulan sampel dilakukan dengan cara sensus yang dapat diartikan sebagai pengambilan sampel berdasarkan atas ciri atau sifat populasi yang berinteraksi langsung dengan pengelolaan hutan jati rakyat. Jumlah sampel yang diambil sebesar 10 responden yang terletak di wilayah Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang preskripsi pengelolaan hutan jati rakyat. Metode wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner kepada 10 responden.
- b. Observasi lapangan dengan cara melihat langsung situasi dan kondisi yang ada di lapangan guna mendapatkan gambar dari objek yang diteliti. Observasi lapangan dilakukan melalui pencatatan, pengukuran dan pengamatan terhadap lahan hutan jati milik responden. Untuk menaksirkan potensi tegakan, pengambilan sampel menggunakan plot ukur berbentuk 4 persegi panjang dengan luas 0,1 Ha dengan ukuran plot 20 x 50 m. Jumlah plot yang diukur adalah sebanyak 10 plot (masing-masing responden 1 plot) yang menyebar secara acak di areal hutan jati rakyat. Adapun cara membuat plot persegi dilihat pada gambar 2



Gambar 2. Petak ukur yang di buat pada lahan hutan jati rakyat di Kecamatan Parangloe

3.5 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder:

a. Data primer diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan kawasan dengan responden yang terlibat langsung dalam pengelolaan hutan jati rakyat data primer terdiri atas:

1. Karakteristik responden meliputi nama, umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan anggota keluarga dan status kepemilikan lahan.
2. Preskripsi pengelolaan hutan jati rakyat, meliputi karakteristik lahan, aktifitas pengelolaan (persiapan lahan, persiapan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran), disamping itu juga dikumpulkan data mengenai potensi tegakan pohon setiap responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder berupa data yang diperoleh dari laporan-laporan sebelumnya, misalnya data dari kantor Kelurahan dan kecamatan serta instansi-instansi terkait seperti Dinas Kehutanan dan Pusat Statistik untuk memperoleh informasi seperti data sosial, ekonomi, penduduk, dan keadaan umum lokasi.

3.6 Analisis Data

Untuk mengetahui preskripsi pengelolaan hutan jati rakyat digunakan analisis sebagai berikut:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan identitas responden dan preskripsi pengelolaan hutan jati rakyat meliputi karakteristik lahan, aktivitas petani pengelola pada hutan jati rakyat, dan cara pemasaran kayu rakyat. Deskripsi responden mempunyai variabel-variabel sebagai berikut (Ridwan 2006 dalam Molo, 2011) :

a. Umur

Umur adalah mulai dari tahun kelahiran masyarakat petani sampai pada saat penelitian dilaksanakan kategori yang digunakan adalah :

1. Kelompok umur produktif muda 15 - 34 tahun
2. Kelompok umur produktif tua 35 - 54 tahun
3. Kelompok umur yang tidak produktif >54 tahun

b. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimaksud adalah jenjang pendidikan formal yang telah diperoleh responden. Indikator ini diukur dengan menggunakan kategori sebagai berikut :

1. Rendah = SD
2. Sedang = SMP
3. Tinggi = SMA-Perguruan tinggi

c. Jumlah Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga yang dimaksud adalah banyaknya anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah atau berada di luar rumah dan menjadi tanggung jawab responden. Indikator ini diukur dengan menggunakan kategori sebagai berikut :

1. Rendah = 0 – 2 orang
2. Sedang = 3 – 5 orang
3. Tinggi = > 5 orang

d. Luas Lahan

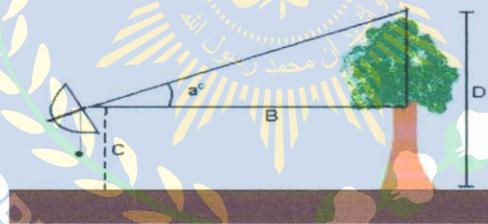
Luas lahan yang diusahakan oleh masyarakat petani untuk mengolah usaha tani dalam satu hektar. Indikator ini diukur dengan menggunakan kategori sebagai berikut :

1. Rendah = $< 0,5$ per satu hektar (ha)
2. Sedang = $0,5 - 1,25$ per satu hektar (ha)
3. Tinggi = $> 1,25$ per satu hektar (ha)

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui potensi tegakan pohon setiap responden. Untuk mengetahui potensi tegakan jati maka data yang telah di peroleh di lapangan akan dianalisis dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

a. Cara mengukur tinggi pohon



Gambar 1. Cara pengambilan data

Tinggi pohon (D) Dapat kita hitung dengan rumus trigonometri sederhana.

$$D = B \times \tan A + C$$

Dengan :

D : Tinggi pohon

B : Jarak pohon terhadap pengamat

Tg : Tangen

A : Sudut puncak objek terhadap pengamat

C : Tinggi pengamat

Cara menghitung Diameter

$$\text{Diameter} = \text{Keliling} / \pi$$

b. Analisis Penaksiran Potensi Tegakan

1. Perhitungan volume pohon

$$V = \frac{1}{4} \times \pi \times d^2 \times Tbc \times fk$$

Keterangan :

V = Volume

π = Konstanta (3,14)

d = diameter

tbc = tinggi bebas cabang

fk = faktor koreksi (0,7) Volume per plot

2. Potensi (m³ / ha) = $\frac{\text{Volume per plot}}{\text{Luas plot}}$

a. Analisis Perhitungan Kerapatan

$$\text{Kerapatan (K) (N/ha)} = \frac{\text{Jumlah individu}}{\text{Luas plot}}$$

IV. KEADAAN UMUM LOKASI

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Parangloe

Kecamatan Parangloe merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, dibentuk berdasarkan pada Nomor 7 Tahun 2005, yang secara administratif Kecamatan Parangloe terbagi ke dalam 7 Desa/Kelurahan sebagai berikut :

1. Kelurahan Lanna
2. Kelurahan Bontoparang
3. Desa Borisallo
4. Desa Lonjoboko
5. Desa Belapungrangan
6. Desa Belabori
7. Desa Bontokassi

4.2 Keadaan Geografis

Kecamatan Parangloe terletak pada ketinggian 92 – 750 M diatas permukaan laut. Kecamatan Parangloe dengan luas wilayah 221,26 Km² atau sebesar 11,75% terdiri dari 20 Dusun/Lingkungan, 48 RK/RW dan 180 RT. Dari total wilayah

Kabupaten Gowa. Wilayah terluas adalah Desa Lonjoboko yaitu 50,77 km² atau sebesar 22,95% sedangkan wilayah terkecil adalah Kelurahan Lanna yaitu 18,75km² atau sebesar 8,47%. Sebagian besar kondisi topografis Desa/Kelurahan merupakan daerah bukan pantai berupa dataran.

Kecamatan Parangloe terletak di dataran tinggi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Kabupaten Maros,

Sebelah selatan berbatasan dengan : kecamatan Manuju,

Sebelah Barat berbatasan dengan : Kabupaten Takalar

Sebelah Timur berbatasan dengan : Kecamatan Tinggimoncong.

Kecamatan Parangloe terletak dengan Wilayah pegunungan, bukit, dan dataran.

Jarak antar desa dan Kelurahan ke Ibukota Kecamatan Berbeda-beda.

4.3 Pola Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di Kecamatan Parangloe dibedakan menjadi lahan sawah dan lahan kering. Lahan sawah meliputi sawah berpengairan setengah teknis dan sawah tadah hujan, lahan kering meliputi lahan pangan dan kehutanan.

Untuk lebih jelasnya, pola penggunaan lahan di Kecamatan Parangloe secara rinci dapat di lihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pola Penggunaan Lahan di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

No	Jenis Lahan	Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
----	-------------	--------------------	-------------------

1	Sawah Irigasi	446	2,66
2	Sawah tadah hujan	583	3,47
3	Tegal/Kebun	1.580	9,42
4	Perkebunan	180	1,07
5	Hutan Rakyat	805	4,80
6	Hutan Negara	670	3,99
7	Lainnya (Kolam tebat/empang)	11.690	69,71
8	Ladang/Huma	815	4,86
Jumlah		16.769	100

Sumber : Kecamatan Parangloe dalam angka 2019

Tabel 1 menunjukkan bahwa penggunaan lahan ketiga adalah lahan hutan. Potensi hutan tersebut jika dihubungkan dengan pengelolaan hutan berkaitan dengan potensi lahan dalam mengembangkan jenis tanaman kayu-kayuan yang tidak hanya bernilai ekonomi tapi bernilai sosial dalam mempertahankan kelestarian alam sekitarnya termaksud kelestarian hutan, sehingga pengembangan dan pengelolaan hutan rakyat dapat terus dilakukan.

4.4 Penduduk

Jumlah penduduk Kecamatan Parangloe berdasarkan jenis kelamin yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel.2 Jumlah Penduduk di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

No	Jenis Kelamin	Jumlah jiwa	Persentase (%)
1	Laki-Laki	8.977	48,83
2	Perempuan	9.407	51,17
Jumlah		18.384	100

Sumber: Kantor Kecamatan Parangloe 2020

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak mendominasi sebesar 9.407 jiwa atau 51,17%. Sementara penduduk dengan jenis kelamin laki-laki lebih kecil jumlahnya dibanding dengan jumlah penduduk perempuan, yakni 8.977 jiwa atau sebesar 48,83% dari jumlah penduduk Kecamatan Parangloe yakni sebesar 18.384 jiwa, penduduk Kecamatan Parangloe 100% beragama Islam.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Karakteristik Sosial Ekonomi Pengelola Hutan Jati Rakyat

5.1.1 Umur responden

Responden pada Kelurahan Lanna, Kelurahan Bontoparang, dan Desa Belapungrangan memiliki umur rata-rata dalam kisaran 25-65, untuk lebih jelas dapat di Lihat pada Tabel 3

Tabel 3. Sebaran Umur Responden Kecamatan Parangloe Per Kelurahan/Desa

No	Umur (tahun)	Jumlah Responden Di Kelurahan/Desa			Jumlah	Persentase (%)
		Kelurahan Lanna (Orang)	Kelurahan Bontoparang (Orang)	Desa Belapungrangan (Orang)		
1	25- 34	2	-	-	2	20
2	35-44	3	-	-	3	30
3	45-64	-	1	4	5	50
4	≥ 65	-	-	-	-	-
Jumlah		5	1	4	10	100

Sumber : Data Primer setelah diolah 2021

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa di kelurahan lanna ada 5 responden, di Kelurahan Bongtoparang 1 responden dan di Desa Belapungrangan 4 responden, dapat di ketahui bahwa sebagian besar responden masih produktif tua untuk bekerja. Akan tetapi dari data yang tersebut dapat diketahui bahwa di kecamatan Parangloe yang menjadi lokasi penelitian, petani yang berusia muda cenderung lebih sedikit yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha hutan jati rakyat maupun usaha petani lainnya.

Pada pengelolaan hutan jati rakyat atau budidaya pertanian lain pada umumnya, faktor usia atau umur bersama dengan faktor pengetahuan akan mempengaruhi produktifitas kerja seseorang, dimana semakin bertambah umur dan lamanya bekerja, maka produktifitas kerja cenderung meningkat.

5.1.2 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan akan mempengaruhi perilaku, pola pikir dan respon masyarakat terhadap suatu informasi dan perubahan. Sebagian besar responden 5 orang atau 50% memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Tingkat Pendidikan Responden di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

No	Tingkat pendidikan	Jumlah Responden Kelurahan/Desa			Jumlah	Persentase (%)
		Kelurahan Lanna (Orang)	Kelurahan Bontoparan (Orang)	Desa Belapungrangan (Orang)		
1	SD	2	1	2	5	50
2	SMP	2	-	1	3	30
3	SMA-Sederajat	1	-	1	2	20
Jumlah		5	1	4	10	100

Sumber : Data Primer setelah diolah 2021

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa tingkat pendidikan responden di Kecamatan Parangloe menandakan sebagian besar tingkat pendidikan pemilik hutan jati rakyat tergolong rendah meskipun sebagian besar tingkat pendidikan hanya setara SD seperti terlihat di Kelurahan Lanna dan Desa Belapungrangan yakni sebesar 50%, selain itu masyarakat menyadari bahwa pengetahuan yang diperoleh dari bangku sekolah dapat digunakan untuk memperbaiki tingkat penghidupannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang petani, maka akan semakin cepat pula petani tersebut dapat menerima suatu teknologi baru. Pendidikan petani mempengaruhi pola pikir petani menjadi dinamis, tingkat pendidikan formal dapat mempengaruhi tingkat kecepatan petani dalam menerima suatu teknologi baru.

5.1.3 Jumlah Tanggungan Keluarga Responden

Rata-rata responden termasuk pada umur produktif tua yang secara umum masih mempunyai banyak tanggungan keluarga. Jumlah tanggungan responden rata-rata adalah 3 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Tanggungan Keluarga Responden Kabupaten Gowa

No	Jumlah Tanggungan Keluarga	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	0 – 2	5	50%
2	3 – 5	4	40%
3	>5	1	10%
Jumlah		10	100%

Sumber : Data Primer Setelah diolah 2021

Berdasarkan Tabel 5 terlihat bahwa jumlah tanggungan keluarga responden sebagian besar di kisaran 0 – 2 orang yakni sebesar 50% yang tergolong rendah. Jumlah tanggungan keluarga petani responden ini bisa juga dipandang sebagai aset yang berpotensi memperlancar kegiatan usaha hutan jati rakyat karena untuk mengelola lahan pertanian diperlukan tenaga kerja yang cukup. Semakin besar anggota keluarga, maka akan memiliki kecenderungan semakin mudah dalam menghadapi persoalan yang di hadapi dalam pengelolaan hutan jati rakyat. Tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan hutan jati rakyat utamanya adalah anggota keluarga, sehingga sering di sebut sebagai manajemen keluarga.

5.1.4 Jenis Pekerjaan Responden

Berdasarkan hasil data diperoleh, dari total 10 responden seluruhnya memiliki pekerjaan pokok sebagai pemilik hutan jati rakyat. Untuk lebih jelas dapat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jenis Pekerjaan Responden di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden di Kecamatan/Desa			Jumlah	Persentase (%)
		Kelurahan Lanna (orang)	Kelurahan Bontoparang (orang)	Desa Belapungrangan (orang)		
1	Pekebun	3	1	2	6	60
2	Peternak	-	-	1	1	10
3	Pedagang	2	-	1	3	30
Jumlah		5	1	4	10	100

Sumber : Data Primer setelah diolah 2021

Berdasarkan Tabel 6 terlihat bahwa pekerjaan pokok responden yang ada di kecamatan Parangloe adalah petani. Namun untuk memenuhi kebutuhan rumah

tangga, pekerjaan pokok tersebut didukung pekerjaan-pekerjaan sampingan yang dapat memberikan penghasilan tambahan bagi rumah tangga responden. Adapun pekerjaan sampingan tersebut antara lain adalah berkebun, beternak, dan berdagang.

Berdasarkan hasil data di peroleh, dari total 10 responden (100%) seluruhnya memiliki pekerjaan sampingan yaitu pekebun 60% jenis pekerjaan ini mereka lakukan dengan memanfaatkan lahan mereka masing- masing yang ada pada kawasan hutan rakyat dengan membudidayakan tanaman sayuran Umbi-umbian dan buah-buahan ,selain itu sebanyak 10% bekerja sebagai peternak dan 30% bekerja dengan pedangan.

5.1.5 Luas lahan yang Dikelola

Rata-rata luas lahan hutan jati rakyat di lokasi penelitian adalah sebesar 0,57. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Luas Lahan Responden

No	Luas Lahan (Ha)	Jumlah Responden di Kelurahan/Desa			Jumlah	Persentase (%)
		Kelurahan Lanna (orang)	Kelurahan Bontoparang (orang)	Desa Belapungrangan (orang)		
1	<0,50	3	-	3	6	60
2	0,51 - 1,25	1	1	1	3	30
3	>1,26	-	-	1	1	10
Jumlah		4	1	5	10	100

Sumber : Data Primer Setelah diolah 2021

Berdasarkan Tabel 7 terlihat bahwa Sebagian besar responden 60% memiliki luas lahan <0,50 Ha dan sebagian lagi 3% memiliki luas lahan 0,51-1,25 Ha luas lahan yang di kelola berpengaruh terhadap besarnya yang diterima pemilik hutan

jati rakyat, semakin luas lahan maka semakin besar pendapatan yang diterima sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

5.2 Analisis Penaksiran Potensi Tegakan dan Perhitungan Kerapatan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data mengenai Potensi Tegakan Jati pada Hutan Jati Rakyat di Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Maka diperoleh volume pohon per Plot, untuk lebih jelasnya dapat kita liat pada Tabel 10 mengenai volume pohon per plot.

Tabel 8. Volume Pohon Per Plot

No Plot	Volume (m ³)	Volume Rata-rata (m ³)
1	13,86	0,32
2	16,64	0,35
3	7,74	0,20
4	2,63	0,07
5	19,99	0,46
6	11,86	0,31
7	43,20	0,83
8	7,52	0,16
9	28,08	0,60
10	9,67	0,21
Jumlah	161,19	3,51
Rata-rata	16,12	0,35

Sumber : Data Primer Setelah diolah 2021

Berdasarkan Tabel 10 diketahui hasil pengukuran volume dari 10 Plot pengamatan dengan luasan hutan Jati Rakyat Responden 5,73 Ha. Dengan jumlah keseluruhan pohon di 10 plot sebanyak 435 dengan luasan plot 1 Ha, dengan nilai kerapatan :

$$\begin{aligned}\text{Kerapatan (k) (N/Ha)} &= \frac{435 \text{ pohon}}{1 \text{ Ha}} \\ &= 435 \text{ pohon/Ha}\end{aligned}$$

Hasil pengamatan dari 10 plot adalah 161,19 m³ sedangkan rata-rata volume sebanyak 16,12 m³. Berdasarkan data tersebut maka dapat di ketahui volume tegakan per Ha adalah 161.19 m³. Sehingga potensi tegakan adalah:

$$\begin{aligned}\text{Potensi (M}^3 \text{ / Ha)} &= \frac{161.19 \text{ m}^3}{1 \text{ Ha}} \\ &= 161,19 \text{ m}^3/\text{Ha}\end{aligned}$$

5.3 Preskripsi Pengelolaan Hutan Jati Rakyat

5.3.1 Karakteristik Lahan Jati

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan di masing – masing lahan hutan jati dan wawancara dengan responden pemilik lahan jati. Maka dapat diketahui bahwa masyarakat yang menanam jati pad lahan –lahan milik mereka ada yang jauh dari rumah responden dan ada yang dekat.

Hal ini dapat dilihat di masing-masing lahan milik responden yaitu pada responden pertama jati tumbuh di areal dengan kemiringan agak curam dan jauh dari pemukiman. Tegakan yang ada di dalam lahan bukan merupakan tegakan

murni jati tetapi bercampur dengan tegakan seperti mahoni dan tanaman liar lainnya.

Responden ke-2 memiliki lahan jati yang terdapat pada areal yang agak curam dan jauh dari pemukiman, jenis tanaman yang tumbuh bercampur dengan jati adalah jenis lain seperti mahoni, nanas, dan kapuk randu. Lahan jati responden ke 3 berada pada areal agak datar, jarak dari pemukiman masyarakat agak dekat jenis tanaman lain yang tumbuh bercampur dan berada di sekitar jati adalah pisang, ubi kayu dan tanaman liar yang tumbuh di sekitarnya.

Responden ke 4 lahan jatinya berada pada areal datar dekat dengan pemukiman dan. Jenis tanaman yang berada di sekitar jati adalah kapuk randu dan semak belukar. Responden ke 5 berada pada areal agak curam jarak dari pemukiman masyarakat agak jauh, tanaman yang bercampur dengan jati adalah semak belukar. Lahan jati yang di kelola oleh responden ke 6 memiliki lahan agak curam, jauh dari pemukiman masyarakat, tanaman yang bercampur dengan jati yaitu kapuk dan tumbuhan liar lainnya.

Lahan jati yang dikelola responden ke 7 berada pada kemiringan agak datar jarak dari pemukiman sangat jauh, tanaman yang tumbuh bercampur dengan jati adalah tumbuhan bawah . Tanaman-tanaman ini tumbuh di lahan yang berbatu dikatakan berbatu dikarenakan terlihat adanya batu-batu cukup besar yang berada di dalam lahan tersebut. Responden ke 8 memiliki lahan jati yang agak datar sangat jauh dari pemukiman masyarakat. Tanaman yang tumbuh bercampur dengan jati adalah mahoni dan tumbuhan liar lainnya..

Responden ke 9 memiliki lahan jati yang agak datar agak jauh dari pemukiman masyarakat, tanaman yang tumbuh bercampur dengan jati adalah jambu mente dan tumbuhan liar lainnya. Lahan jati responden ke 10 berada pada areal yang agak curam jauh dari pemukiman dan tanaman tumbuh bercampur dengan jati adalah jambu mente, jambu biji dan semak belukar.

5.3.2 Aktifitas Pengelolaan Hutan Jati Rakyat

a. Penanaman

Penanaman jati dilakukan dengan sistem permudaan yang terbentuk selama ini adalah permudaan alam yang terutama berasal dari permudaan anakan jati yang tumbuh secara alami dibawah pohon induk. Anakan jati ini biasanya dipindahkan dan di tanam langsung dengan melakukan persiapan lahan terlebih dahulu pada areal kosong, misalnya tempat bekas penebangan dan areal yang tidak terpakai. Jadi masyarakat menanam jati kembali setelah melakukan penebangan. Masyarakat sudah menjadikan hal ini sebagai tradisi di kelurahan/Desa tersebut, selain untuk menjaga kelestarian hutan didaerah agar juga pengelolaan hutan jati mereka tetap berlanjut. Akan tetapi sebagian besar responden setelah menebang, tidak menanam areal bekas tebangan, mereka cukup mengandalkan bibit dari permudaan alam yang memang jumlahnya cukup berlimpah, dan terubusan (tunas yang tumbuh dari tunggak bekas tebangan) sehingga masyarakat tidak membuat bibit tanaman buatan.

Masyarakat menanamnya di kebun sendiri di luar daerah pemukiman umumnya mereka mengaku menanam jati hanya bukti bahwa mereka pemilik lahan tersebut. Beberapa alasan masyarakat menanam jati diantaranya adalah sebab jati

mudah tumbuh, tidak memerlukan pemeliharaan yang insentif bibit mudah di dapatkan serta tahan terhadap musim kering atau kemarau.

b. Pemeliharaan

Pemeliharaan yang petani lakukan tanaman jati mudah tidak terlalu banyak dikarenakan tanaman jati mudah tumbuh secara alami serta penjagaan dari gangguan ternak tidak menjadi masalah karena umumnya masyarakat jarang yang memelihara hewan ternak, walaupun ada yang memeliharanya hewan tersebut di buat kandang.

Setelah dewasa pemeliharaan dari gulma atau tanaman pengganggu lainnya sudah jarang dilakukan. Ini terlihat pada lahan jati responden yaitu banyaknya tanaman liar dan semak belukar diantara tanaman jati merek. Umumnya pada musim kemarau gulma atau tanaman pengganggu tersebut tidak dapat bertahan hidup jadi umurnya biasanya cuman satu musim.

Pemeliharaan selanjutnya adalah pemangkasan. Pemangkasan dilakukan terhadap pohon yang pertumbuhannya kurang bagus. Misalnya ujung pohon patah atau berupa cacat lain. Jadi jumlahnya tidak terlalu banyak. Hasil dari pemangkasan ini berupa kayu bakar atau tiang-tiang pgar. Untuk penjarangan masyarakat petani tidak melakukannya.

c. Pemungutan Hasil

Pemungutan hasil dari hutan jati rakyat di Kecamatan Parangloe dilakukan dengan cara memilih dan menebang pohon yang laku untuk di jual adanya permintaan dari pembeli. Umumnya kayu jati yang dimiliki digunakan untuk konsumsi sendiri dan untuk dijual pada pembeli yang datang. Pembeli yang

datang dari kota dan penduduk lokal dari desa itu sendiri yaitu tukang kayu yang biasanya mencari kayu jati untuk di buat rumah atau bentuk lainnya. Penebangan pohon jati ini adalah sistem tebang pilih yaitu tidak didasarkan pada rotasi optimum tegakan tetapi menurut permintaan pembeli yang menentu waktunya.

Sistem penebangan seperti diatas. Biasanya menunjukkan bahwa hutan jati rakyat belum dikelola secara baik karena petani hanya memungut beberapa pohon sesuai kebutuhan. Pelaksanaan penebangan untuk memenuhi keinginan pembeli dilaksanakan oleh seorang *chainsawman* (pemilik gergaji mesin) yang di sewa oleh petani pemilik hutan jati rakyat yang biasanya berasal dari desa itu sendiri setelah terjadi kesepakatan antara pemilik hutan jati dan pihak pembeli dan biasanya juga penebangan dilakukan sendiri oleh pemilik hutan jati rakyat.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian preskripsi pengelolaan hutan jati rakyat di kecamatan parangloe Kabupaten Gowa yang diterapkan masyarakat di Desa/Kelurahan ini masih sederhana, antara lain sistem budidaya yang di terapkan hanya mengandalkan bibit anakan alami sebagai sumber bibit. Pemeliharaan dilakukan berupa pembersihan gulma, pemangkasan serta pemeliharaan serta pemeliharaan trubusan yang sudah tumbuh. Pemungutan hasil dilakukan dengan cara memilih dan menebang pohon setelah adanya permintaan dari pembeli. Volume rata-rata yaitu 16,12 m³/ha, kerapatan 435 pohon/ha dan potensi 161,19 m³/ha. Artinya potensi hutan jati rakyat yang ada pada Kecamatan Parangloe cukup besar.

6.2 Saran

1. Melihat potensi hutan rakyat dapat dikelola secara lestari maka perlu ada fasilitas dari pemerintah daerah untuk membangun kelompok pengelolaan hutan rakyat dengan unit pengaturan hasil lestari.
2. Perlu adanya kelembagaan dalam melakukan penyuluhan atau pemberian informasi tentang kehutanan lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan serta pengelolaan yang baik sehingga kelestarian hutan tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, S dkk. 2002. *Hutan Rakyat, Sosial Ekonomi dan Pemasaran*. BPFE. Yogyakarta.
- Awang S.A., et al 2007. *Unit Manajemen Hutan Rakyat: Proses Kontruksi Pengetahuan Lokal*. *Art Network*. PKHR Fahutan UGM, Bayumili, Yogyakarta
- Hendra S, Baba B, dan Suwardi. 2014. *Analisis Potensi Pengembangan Hutan Rakyat di Kabupaten Lombok Tengah*. *Majalah Ilmiah Globe* 16(1): 69-76
- Indarti, Titik. 2008. Pengaruh Kebijakan Investasi Kehutanan Terhadap kondisi Pasar Kayu Indonesia. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan* 5(1): 1-14
- Kaskoyo, Hari., Mohamed, Abrar Johar, dan Inoue, Makoto. 2014. *Present State of Community Forestry (Hutan Kemasyarakatan/HKm) Program in a Protection Forest and Its Challenges: Case Study in Lampung Province, Indonesia*. *Journal of Forest Science*. Volume 30. Nomor 1. Hlm 15-29.
- Promo, Agus Astho., 2010. *Pengelolaan Hutan Jati Rakyat.*, Panduan Lapangan Untuk Petani, CIFOR, Bogor, Indonesia
- Supriatna J. 2008. *Melestarikan Alam Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta.
- Forest Watch Indonesia. 2014. *Potret Keadaan Hutan Indonesia Periode 2009-2013*. Bogor
- Supratman dan Samsul Alam ., 2009. *Buku Ajar Manajemen Hutan, Laboratorium, Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan*, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
- Suryandari EY. 2008. Analisis Permintaan Kayu Bulat Industri Pengelolaan Kayu. *Jurnal Penelitian sosial dan Ekonomi Kehutanan* 5(1): 15-26
- Trisno s dan Hero 2011. *Hutan Rakyat di Indonesia, Tinjauan Aspek Sosial, Kebijakan*, *Jurnal Kehutanan Masyarakat* Vol. 3 No. 1 Hal 79-92 Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat, Indonesia
- Widayanti,Sri. Januari-Juni 2012. "Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan Teoritis" *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 1.